

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1) Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Haliah, 2012).

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam

pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory*

merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2) Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ihyaul, ulum 2004). Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun instansi yang telah ditentukan atas pilihan serta tindakannya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terdiri dari 1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas

vertikal). 2) Pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Mardiasmo (2002:20).

Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan *stewardship* yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggungjawab serta berkewajiban untuk membuat pelaporan pengungkapan secara rinci dan jelas.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggaran Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja. Tujuan yang berikutnya adalah perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Teori akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban yang jelas kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam sebuah organisasi (Rasul, 2003).

Mardiasmo (2005:21) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Keterkaitan teori akuntabilitas dengan penelitian ini yaitu, dikarenakan bahwa pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi aspek akuntabilitas atau pertanggungjelasn dalam memimpin, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

3) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 PP No. 101 Tahun 2000 bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan jabatannya. Kemampuan sumber daya manusia

merupakan hal yang penting dalam mencapai keberhasilan serta tujuan dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi sektor publik sangat ditekankan pada kemampuan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga organisasi sektor publik memiliki reputasi kinerja yang unggul serta *akuntabel* dipandangan masyarakat.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

Kompetensi sumber daya manusia yaitu menggambarkan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan atau peran secara efektif (Wirawan, 2009;9).

4) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (*cash towards accrual*) sampai basis akrual.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemahaman SAP merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun pelaporan keuangan. Dimana dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam

Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP N0 24 Tahun 2005) adalah:

1. **Relevan**, yaitu informasi yang didalamnya memuat tentang informasi yang dapat memengaruhi kepuasan pengguna dan dapat membantu mereka dalam menemukan titik keluarnya, baik sebagai alat untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, atau masa kini, dan untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

✓ Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang dapat membantu untuk memprediksi masa depan, dengan melihat suatu peristiwa masa lalu dan mempertimbangkannya, serta berdasarkan kejadian masa kini.

✓ Tepat Waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.

2. **Lengkap**, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dibutuhkan dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

3. **Andal**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan material, menyajikan informasi secara benar dan jujur, serta dapat diverifikasi kesalahannya.

4. **Netralitas**, yaitu informasi yang dapat digunakan oleh siapapun serta bersifat umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

5. **Dapat dibandingkan**, yaitu informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan periode yang lalu serta dapat dibandingkan dengan entitas lain yang bergerak dalam bidang yang sama.
6. **Dapat dipahami**, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh semua kalangan ataupun pihak pengguna laporan keuangan. Dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.

Jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.

5) Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai

mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kinerja pencapaian. Pengendalian intern tidak terbatas hanya pada rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan yang berkaitan dengan proses menentukan keputusan yang mengarah pada otorisasi pimpinan atas transaksi tertentu. Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas kegiatan operasi, serta merupakan pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan (Sukmaningrum 2012).

6) Sarana Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung adalah suatu ukuran tentang tingkat pelayanan yang tersedia pada sarana yang memadai. Sangat, sulit rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan instansi dapat tercapai jika sarana prasarana tidak memadai. Pada Instansi pemerintah harus memperhatikan mengenai kebutuhan dan perlengkapan operasional karena hal tersebut merupakan alat penunjang keberhasilan suatu visi, misi dan sasaran dalam sebuah organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991) dalam Wijana (2007), merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Diukur berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan dapat menciptakan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan menyampaikan Informasi Keuangan Daerah terhadap pelayanan publik.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Roviyantie (2013) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dalam kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) dengan judul pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan SAP maka akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang

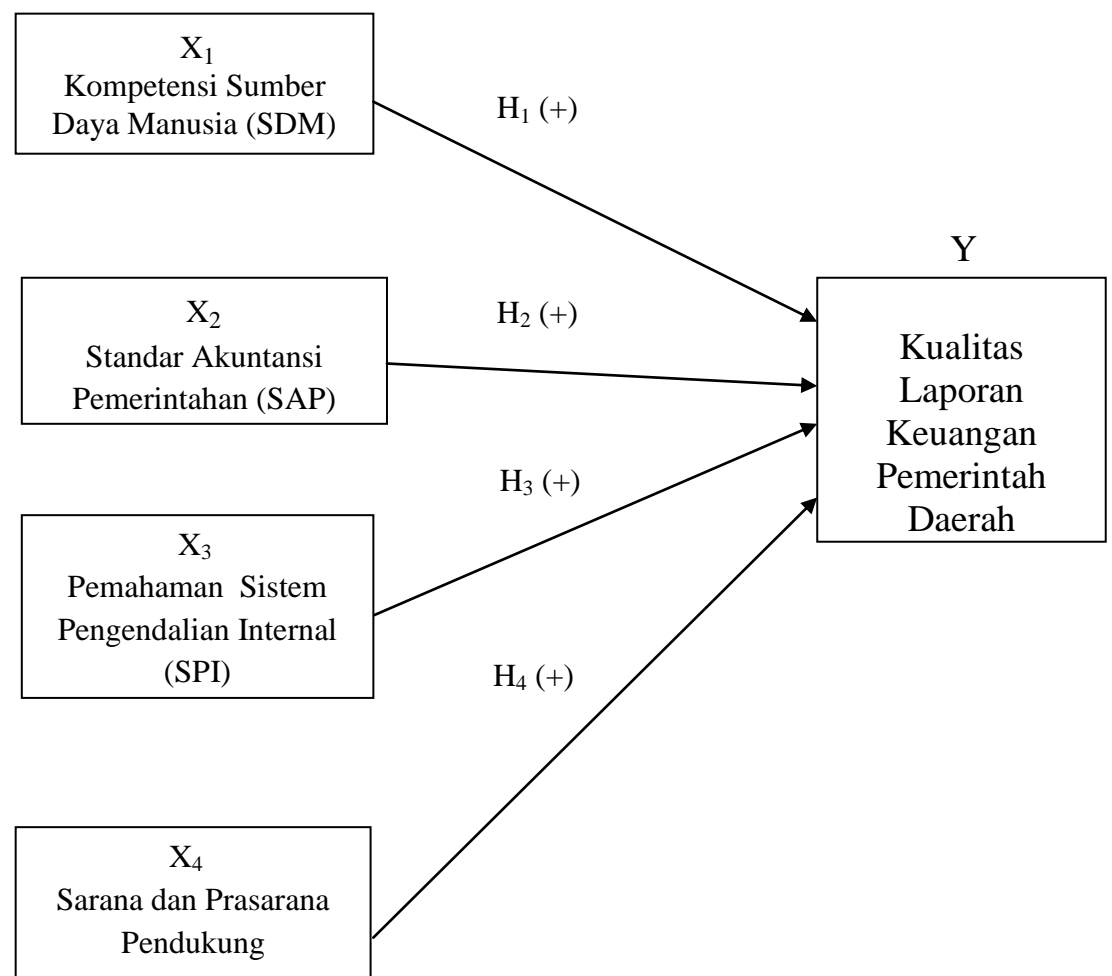
berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut penelitian yang telah dilakukan Priyamana *et al*, (2014) dan menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.. Hal ini berarti dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin membaik.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa Pengendalian Internal Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Celviana Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal, berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian Priyamana *et al*, (2014) menunjukkan terdapat pengaruh positif antara pemanfaat teknologi informasi dengan keterandalan laporan keuangan.

C. MODEL PENELITIAN**Gambar 2.1.****Model Penelitian**

D. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1) Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kapasitas SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap tanggung jawab yang diberikan, serta pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh lembaga instansi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan. Untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya, manajemen harus ditata ulang oleh individu yang berlatarbelakang/ahli dalam bidang ilmu akuntansi.

Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007 menyebutkan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional, efektif dan efisien. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan

dalam penyelesaian pengelolaan data akan berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyelesaian tepat waktu dalam penyusunan penyajian laporan keuangan.

Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang baik. Dalam hal ini kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan. Apabila kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki bagus, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, begitu sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta pelaporan yang dapat dilakukan secara tepat waktu.

Logikanya bahwa suatu kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas, karena suatu pekerjaan yang tidak didasari oleh sebuah pengetahuan/kompetensi maka tidak dapat menghasilkan suatu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, jika sebuah pekerjaan dilakukan dengan kemampuan yang baik, maka akan sangat berpengaruh pada kinerja baik untuk jangka pendek maupun untuk

jangka panjang. Tidak ada suatu pekerjaan yang dapat dihasilkan dengan baik, jika tidak memiliki kompetensi.

Penelitian yang dilakukan Indah (2008) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP No. 24 tahun 2005. Penelitian Rahmayati (2012) dan Choirunisah (2008) menemukan bukti bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Negara/lembaga. Penelitian Agus Ali Suharto (2012) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada inspektorat kabupaten kediri mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pegawai inspektorat kabupaten kediri. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Kusuma (2014) menghasilkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menandakan bahwa nilai informasi yang baik berarti laporan keuangan tersebut berkualitas. . Maka pengembangan hipotesisnya sebagai berikut.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

2) **Hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dan untuk memperoleh hasil pengukuran kinerja yang lebih baik dan memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka penerapan SAP sangat ditekankan. Penerapan SAP yang sudah sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP dapat diwujudkan

Penerapan SAP diyakini memiliki dampak yang baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riani Nurhayati (2013) menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemahaman terhadap SAP memang sangat penting, dikarenakan untuk menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas maka, pemahaman SAP harus benar-benar dikuasai dan dipahami serta dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesisnya sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.

3) Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian dan Gatot, 2002: 204), yaitu : 1). Pengendalian intern akuntansi, dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 2). Pengendalian administrative, dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya

kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Dalam penelitian Irine Chintya (2015) tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah di kota solok (studi pada SKPD kota Solok). Hasil penelitian Irine menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di kota Solok. Sukmaningrum (2012), Fadhila (2013) dan Lubis (2014) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas peneliti menggunakan kembali variabel Sistem Pengendalian Internal kedalam penelitian dikarenakan perbedaan lokasi geografis dari penelitian terdahulu.

Logikanya bahwa, pengendalian internal ini sangat berkaitan dengan strategi, aktivitas transaksi kemudian proses akhir pelaporan yang dilakukan pada setiap pemerintah daerah. Selain itu SPI juga merupakan salah satu tolak ukur yang harus dipantau agar antara perencanaan dengan hasil yang dihasilkan seimbang. Jika strategi yang telah ditentukan sesuai, maka SPI pada instansi pemerintah daerah sudah baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat

hubungan positif antara penerapan SPI pada kualitas LKPD sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₃: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul

4) Hubungan antara Sarana Prasarana Pendukung dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu manfaat utama dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi yaitu pekerjaan dapat terselesaikan lebih cepat. Divisi-divisi dalam organisasi diharapkan dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan mempercepat proses pertukaran atau arus informasi antar divisi sehingga hasil kinerja menjadi lebih bagus. Berkaitan dengan aspek pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi diharapkan dapat membantu.

Maka disini peneliti menggolongkan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam sarana prasarana pendukung, karena lebih luas pembahasannya jika pemanfaatan Teknologi Informasi digolongkan menjadi sarana prasarana pendukung. Adapun sarana prasarana pendukung disini yang tergolong diantaranya yaitu, pemanfaatan komputer, printer, serta pemanfaatan internet untuk memudahkan

aktivitas terkait dengan *Software* maupun *Hadware* untuk kualitas laporan keuangan yang baik, serta memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kebutuhan instansi pemerintah, yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

Nurillah As Syifa (2014) melakukan penelitian untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum (2010), Kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan penjelasan diatas yaitu:

H₄: Pemanfaatan Sarana Prasarana Pendukung Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pegawai penyusun laporan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 2) untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 3) untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 4) untuk menganalisis adanya pengaruh sarana dan prasarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul. 5) untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris adanya pengaruh dari semua variabel independen yang dipilih terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten gunung kidul.